



SALINAN

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS  
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK  
TAHUN 2022-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan hak anak agar terlindungi dan dapat berkembang secara optimal, perlu upaya dari pemerintah daerah melalui kebijakan pengembangan kabupaten layak anak;
- b. bahwa dalam rangka pengembangan kabupaten layak anak secara sistematis, terarah dan tepat sasaran, perlu penguatan kelembagaan anak dan pemenuhan hak anak dalam 5 (lima) klaster dengan cara pendayagunaan potensi lokal dan aspek sosial budaya serta ekonomi;
- c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan rencana aksi daerah pengembangan kabupaten layak anak diperlukan suatu pengaturan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak Tahun 2022-2027.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara tahun 2008 nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4879);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019 Nomor 435);
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020 Nomor 77, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 78);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2022-2027.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin



pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Anambas.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
6. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak Anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak Anak.
7. Rencana Aksi Daerah yang selanjutnya disingkat RAD adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai instrumen dalam mewujudkan KLA.
8. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD-KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
9. Gugus Tugas KLA Kabupaten adalah lembaga koordinatif di tingkat Daerah yang mengoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.



## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam mewujudkan Pengembangan KLA.

### Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah:

- a. menjamin terpenuhinya hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, demi terwujudnya Anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
- b. menjamin pemenuhan hak Anak di dalam menciptakan rasa aman, ramah, dan bersahabat;
- c. melindungi Anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya;
- d. mengembangkan potensi, bakat, dan kreatifitas Anak;
- e. mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi Anak; dan
- f. membangun sarana dan prasarana di Daerah yang mampu memenuhi kebutuhan dasar Anak sehingga Anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

## BAB III PENYUSUNAN DAN SASARAN RAD-KLA

### Pasal 4

- (1) Penyusun RAD-KLA dengan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Visi Misi, kebijakan, program, dan kegiatan Pemerintah Daerah yang terintegrasi dengan kegiatan Perangkat Daerah.
- (2) RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan Gugus Tugas KLA Kabupaten

dalam memantau dan mengevaluasi program kegiatan Pengembangan KLA dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2022 sampai dengan tahun 2027.

- (3) RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

- (1) RAD-KLA dilaksanakan oleh Gugus Tugas KLA Kabupaten.
- (2) RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki sasaran:
  - a. penguatan kelembagaan Anak; dan
  - b. pemenuhan hak Anak.
- (3) Sasaran RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas 5 (lima) klaster yaitu:
  - a. hak sipil dan kebebasan;
  - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
  - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
  - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
  - e. perlindungan khusus.

### BAB IV

#### GUGUS TUGAS KLA KABUPATEN

#### Pasal 6

- (1) Gugus Tugas KLA Kabupaten beranggotakan unsur eksekutif, unsur yudikatif, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha dan Forum Anak.
- (2) Gugus Tugas KLA Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan KLA;
  - b. menetapkan tugas dari anggota Gugus Tugas KLA Kabupaten;

- c. melakukan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan KLA;
  - d. mengumpulkan data dasar;
  - e. melakukan analisis kebutuhan yang bersumber dari data dasar;
  - f. melakukan diseminasi data dasar;
  - g. menentukan fokus dan prioritas program dalam mewujudkan KLA yang disesuaikan dengan potensi Daerah;
  - h. menyusun RAD dan mekanisme kerja KLA 5 (lima) tahunan; dan
  - i. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang dilakukan oleh Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan pelaksanaan RAD-KLA.

## BAB V PENDANAAN

### Pasal 7

Pendanaan pelaksanaan pengembangan KLA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Ditetapkan di Tarempa  
pada tanggal 7 April 2022

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

dto

ABDUL HARIS

Diundangkan di Tarempa  
pada tanggal 7 April 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

dto

SAHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2022  
NOMOR 650

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM



BASISWAN M., SH., MH.

Penata Tk. I

NIP. 198306042014041001

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS.  
NOMOR 7 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN  
KABUPATEN LAYAK ANAK TAHUN 2022-2027

RENCANA AKSI DAERAH  
PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK TAHUN 2022-2027

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah amanah dan sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi Anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang termuat dalam Undang Undang Dasar 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak Anak (*Convention on the Right of the Children*). Secara pribadi Anak adalah tanggungjawab orang tua dan keluarga, tetapi secara sosial Anak merupakan tanggung jawab negara. Jika sebuah negara ingin berkembang dan maju serta memiliki generasi muda yang siap, maka negara harus memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia sejak masih Anak-Anak.

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memilki peran strategis, mempunyai ciri, dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Mereka tidak hanya merupakan masa depan saja, tetapi juga masa kini bangsa Indonesia.

Setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang serta berhak atas perlindungan dari segala bentuk-bentuk kekerasan. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak pada tahun 1990 dengan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). Konvensi Hak Anak telah menjadi bagian dari sistem hukum Indonesia dan sebagai konsekuensinya Negara Kesatuan Republik Indonesia berkewajiban untuk



memenuhi hak-hak Anak dan melindungi Anak dari setiap tindakan diskriminasi serta kekerasan yang tercantum di dalam Konvensi Hak Anak tersebut.

Ada banyak persoalan Anak yang terjadi di negara ini, seperti kemiskinan, perdagangan Anak, prostitusi online, pelecehan seksual, *bullying*, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain-lain. Eksploitasi Anak di bidang ekonomi bahkan tindak kekerasan yang terjadi, seringkali sudah di luar batas kemanusiaan. Selain itu, persoalan paling mendasar seperti masih ditemukannya cukup banyak Anak yang mengalami gizi buruk sehingga tumbuh kembang mereka tidak optimal dan masih banyak Anak usia sekolah yang putus sekolah serta Anak bekerja di tempat kerja yang tidak ramah Anak.

Guna mendukung agar setiap Anak Indonesia kelak mampu memikul tanggung jawab masa depan bangsa Indonesia, maka setiap Anak Indonesia tanpa terkecuali harus bisa terpenuhi segala yang menjadi haknya. Setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia agar menjadi Anak yang jujur, berakhlak mulia, sehat, cerdas dan berprestasi.

Tumbuh kembang Anak merupakan salah satu fase dalam siklus kehidupan manusia yang tidak dapat terulang. Keberhasilan atau kegagalan seseorang Anak dalam melewati masa tumbuh kembang tersebut bersifat permanen. Oleh karena itu tumbuh kembang Anak merupakan isu pembangunan yang sangat penting. Hal itu ditegaskan dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 28B ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Penghormatan, pemenuhan, dan penjaminan hak-hak Anak menjadi tanggungjawab bersama orangtua, keluarga, masyarakat dan negara. Kualitas sumber daya manusia tidak dapat dipungkiri ditentukan oleh kualitas pertumbuhan dan perkembangan Anak. Bagaimana mereka disiapkan, dibentuk, dan dijamin pemenuhan haknya. Dengan demikian penyiapan Anak untuk menjadi manusia masa depan yang diharapkan adalah kunci utama yang harus mendapat prioritas dari negara.



Kebijakan Pengembangan KLA yang sudah dicanangkan secara nasional telah mendorong Daerah untuk memiliki komitmen melakukan perlindungan dan pemenuhan hak Anak. Daerah yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak Anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan Anak.

Kabupaten Kepulauan Anambas baru tahun 2020 secara administratif telah mendapatkan predikat KLA Kategori Pratama dari Presiden Republik Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pembentukan KLA di Daerah telah menjadi komitmen bersama sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar serta memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan seperti pemantapan dan penunjukan sekolah ramah Anak, rumah ibadah ramah Anak, puskesmas ramah Anak, dan desa ramah Anak di tingkat kecamatan dan juga untuk mengetahui pemenuhan hak Anak di berbagai sektor, termasuk rumah sakit layak Anak dan adanya forum Anak di tingkat desa hingga kabupaten.

KLA adalah salah satu dari sub sistem dari sistem pembangunan tingkat kabupaten yang berpihak pada Anak. KLA bukanlah kegiatan atau program apalagi proyek tetapi merupakan proses pembangunan Daerah yang lebih memperhatikan Anak sebagai penerus bangsa.

Untuk percepatan Daerah sebagai KLA seharusnya didukung dengan sebuah RAD yang lebih terstruktur dimana semua Perangkat Daerah dan stakeholder terlibat langsung dalam perlindungan dan pemenuhan hak Anak, turut berpartisipasi dalam menggagas masa depan Daerah melalui penyusunan instrumen monitoring dan evaluasinya, melakukan pertemuan yang terkoordinasi secara regular untuk pembahasan indikator lokal di tingkat desa dan ikut memfasilitasi kemajuan pencapaian indikatornya.

#### B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang *Pengesahan Convention on The Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019 Nomor 435);



## BAB II

### KEBIJAKAN RAD-KLA

#### A. Tujuan

1. Tujuan umum dari penyusunan RAD-KLA adalah:
  - a. wujudkan iklim yang berpihak pada tumbuh kembang Anak di Daerah sehingga ruang aman dan nyaman bagi tumbuh kembang generasi penerus bangsa dapat terwujud; dan
  - b. menjadi sarana terbaik dalam mewujudkan KLA di Kabupaten Kepulauan Anambas sehingga terbentuk rencana kerja yang harmonis dan mencakup keseluruhan unsur yang terkait untuk mewujudkan sinergitas dalam pelaksanaannya.
2. Tujuan khusus dari penyusunan RAD-KLA adalah:
  - a. merumuskan isu-isu di KLA yang terkait dengan hak-hak Anak yang tertuang dalam 5 (lima) klaster hak Anak;
  - b. membuat indikator lokal sebagai tolok ukur capaian masing-masing klaster di tingkat desa;
  - c. tersedianya data dan informasi yang berkaitan dengan pemenuhan hak Anak yang akan dilakukan OPD selama 4 tahun ke depan; dan
  - d. menyusun Rencana Aksi Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD yaitu klaster hak sipil dan kebebasan, klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative, klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, dan Klaster Perlindungan Khusus selama 4 tahun.

#### B. Strategi Capaian

Hasil capaian yang diharapkan dari penyusunan RAD-KLA adalah :

1. terkumpulnya database dari berbagai sumber, baik perangkat daerah maupun lembaga masyarakat yang bergerak dalam isu Anak;
2. terumuskannya isu strategis terwujudnya KLA di daerah dengan terpenuhinya 31 (tiga puluh satu) indikator KLA termasuk adanya indikator tambahan (lokal) yang berkaitan dengan hak-hak Anak dalam 5 (lima) klaster;
3. tersusunnya matrik perencanaan program yang didukung legalitas RAD-KLA;



4. tersusunnya RAD-KLA selama 5 (lima) tahun yang menjadi acuan masing masing perangkat daerah terkait dalam merencanakan kebijakan, implementasi, monitoring, dan evaluasi pengarusutamaan hak Anak; dan
5. tercapainya *outcome* capaian indikator-indikator yang terdapat pada masingmasing klaster dan kelembagaan.

C. Program Kegiatan 5 (lima) Tahun (2022-2027)

1. Program dan Kegiatan Per Klaster:

No	Indikator KLA	Masalah	Kegiatan	Indikator	Waktu / Tahun 2022 – 2026					Penanggung Jawab
					22	23	24	25	26	
A.	PENGUATAN KELEMBAGAAN									
1.	Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak	Sudah terdapat PERDA Nomor 1 Tahun 2020 tentang KLA, namun sosialisasi dan implementasinya masih	Sosialisasi dan koordinasi dari dari gugus tugas	Adanya peraturan perundang-undangan dalam pemenuhan hak anak						1. Dinsosp3apmd 2. Bagian Hukum Setda
2.	Persentase anggaran untuk pemenuhan hak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan	Penguatan kelembagaan belum maksimal, persentase anggaran untuk 5 klaster meningkat	Masing-masing OPD gugus tugas KLA mengalokasikan dana untuk pemenuhan hak, termasuk anggaran untuk penguatan	Adanya peningkatan anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk						OPD gugus tugas KLA
3.	Jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum	1. Tidak semua pembuatan peraturan perundang-undangan dan kebijakan program melibatkan Forum Anak dan kelompok anak lainnya 2. Sosialisasi tentang	1. Sosialisasi tentang partisipasi anak 2. Pemahaman tentang hak anak kepada pemangku kepentingan							1. Dinsosp3apmd 2. Bagian Hukum Setda

No	Indikator KLA	Masalah	Kegiatan	Indikator	Waktu / Tahun 2022 – 2026					Penanggung jawab
4.	Tersedia sumber daya manusia (SDM) terlatih KLA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam	1. Belum tersedianya SDM yang terlatih KHA 2. Kader pembangunan ditingkat Desa/Kelurahan belum	1. Sosialisasi KHA pada kader pembangunan ditingkat Desa/Kelurahan 2. Sosialisasi UU PA							1. Dinsosp3apmd 2. Bagian Hukum Setda
5.	Tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan	Data anak yang tersedia belum mutakhir	1. Pemutakhiran data anak 2. Pembuatan profil anak Kabupaten Kepulauan							1. Dinsosp3apmd 2. Disdukcapil 3. BPS
6.	Keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak									1. KPPAD 2. Dunia Usaha
7.	Keterlibatan dunia usaha dalam Pemenuhan	Belum semua dunia usaha tersosialisasikan dengan hak anak	Meningkatkan kemitraan antara pemerintah dengan pihak swasta							1. Dinsosp3apmd 2. Dunia Usaha

**B** INDIKATOR CLUSTER I : HAK SIPIL DAN KEBEBASAN



No	Indikator KLA	Masalah	Kegiatan	Indikator	Waktu / Tahun 2022 – 2026					Penanggung Jawab
	Persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran	1. Kurangnya kesadaran masyarakat (orang tua) akan pentingnya kegunaan Akte Kelahiran 2. Dari usia 0-19 tahun (jumlah anak ..... ) yang	1. Melakukan sosialisasi melalui media masa dan media elektronik serta <i>face to face</i> /tatap muka 2. Melakukan pelayanan	1. Memahami arti penting Akte Kelahiran 2. Seluruh anak-anak Kabupaten						Disdukcapil
10.	Tersedia fasilitas informasi layak anak	1. Belum tersedianya pelayanan anak <i>on line</i> 2. Masih kurangnya pesan-pesan yang mendidik didalam pembuatan iklan 3. Kurangnya minat baca anak 4. Kurangnya taman baca anak di Desa/Kelurahan 5. Kurangnya fasilitas mobil pustaka keliling	1. Mendirikan pelayanan telepon sahabat anak 2. Mengoptimalkan peran guru BK 3. Dinas terkait mensleksi iklan yang akan ditayangkan ke publik 4. Mengadakan lomba baca puisi dan lomba bercerita anak 5. Meningkatkan jumlah taman baca dan melengkapi sarana dan prasarana yang	1. Tersedianya pelayanan telepon sahabat anak 2. Tersedianya iklan yang mendidik bagi anak 3. Mengembangkan ilmu pengetahuan anak 4. Meningkatkan minat baca anak						1. Diskominfo 2. Dinsosp3apmd 3. Dsdikpora 4. Bagian Humas dan Perpustakaan Setda

No	Indikator KLA	Masalah	Kegiatan	Indikator	Waktu / Tahun 2022 – 2026					Penanggung Jawab
11.	Jumlah kelompok anak, termasuk Forum Anak, yang ada di Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan	1. Belum semua Desa dan Kelurahan yang membentuk Forum Anak Desa/ Kelurahan 2. Masih kurang fasilitas pendukung kegiatan Forum Anak 3. Forum Anak belum dilibatkan dalam pengambilan kebijakan pemerintahan 4. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang keberadaan	1. Pengadaan sarana sekretariat yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan yang dilakukan Forum Anak 2. Mendengarkan suara anak dalam pengambilan kebijakan pemerintah 3. Mengadakan sosialisasi tentang keberadaan Forum Anak yang melibatkan	1. Tersedianya fasilitas yang memadai untuk menunjang kegiatan Forum Anak 2. Anak terlibat dalam pengambilan kebijakan pemerintah 3. Masyarakat mengetahui						1. Dinsosp3apmd 2. Forum Anak Kabupaten Kepulauan Anambas
12.	Forum Anak/ Desa/ Kelurahan dan Kecamatan Aktif dan terlihat dalam Musrenbang	Belum melibatkan Forum Anak Kecamatan, Kelurahan dan Desa dalam Kegiatan Perencanaan	Melibatkan Forum Anak di 6 Kecamatan Dalam Kegiatan Perencanaan							1. Camat 2. Kepala Desa/ Lurah
13.	Kecamatan Layak Anak (Kelana) dan Desa/Kelurahan	Mempercepat Deklarasi Kecamatan/ Desa/ Lurah Layak Anak	Deklarasi 5 Kecamatan, 1 Kelurahan dan 27 Desa							1. Camat 2. Kepala Desa/ Lurah



No	Indikator KLA	Masalah	Kegiatan	Indikator	Waktu / Tahun 2022 – 2026					Penanggung Jawab
14.	Pemenuhan Hak Anak	Menyediakan Pojok ASI dan Tempat bermain Anak								1. OPD Pelayanan 2. Kantor Camat
15.	Taman Bermain Ramah Anak	1. Papan Informasi Fasilitas Wifi 2. Kepemilikan/ Pengelola/ Penanggung Jawab 3. Mempercepat Pengadaan Fasilitas Bermain Anak di Taman Bermadah/ Pemeliharaan tempat bermain anak	1. Membuat Papan Informasi Fasilitas Wifi 2. Membuat SK Pengelola Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) yang ditandatangani Bupati 3. Menambah alat bermain di Ruang Bermain Ramah Anak (RMRA)							1. Diskominfo 2. Bappeda 3. Dinsosp3apmd 4. Disparbud 5. Bagian Umum dan Keuangan Setda
16.	Angka Kecelakaan Lalu Lintas Pada Anak	Data Jumlah Kecelakaan yang terjadi pada anak	Permohonan Permintaan Data Jumlah Kecelakaan yang terjadi pada anak							1. Dishub LH 2. Polres
C	INDIKATOR CLUSTER II : HAK LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF									



No	Indikator KLA	Masalah	Kegiatan	Indikator	Waktu / Tahun 2022 – 2026					Penanggung Jawab
17.	Persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 tahun	1. Perkawainan dibawah umur  2. UUPA/ Pengarus-utamaan Hak Anak, UU Perkawinan, Kesehatan reproduksi belum tersosialisasi	1. Memperketak persyaratan perkawinan dibawah umur  2. Melakukan Sosialisasi UUPA/ Pengarus-utamaan Hak Anak, UU Perkawinan, Kesehatan reproduksi	3. Adanya kesadaran masyarakat untuk mencegah perkawinan dini  4. Adanya persyaratan						1. Dinsosp3apmd 2. Disdukcapil 3. Kemenag
18.	Tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak	1. Kurangnya pemahaman pengurus Ormas dan LSM tentang pengasuhan dan peningkatan kesejahteraan anak  2. Tempat Penitipan Anak yang masih minim	1. Melatih pengurus Ormas dan LSM tentang pengasuhan dan peningkatan kesejahteraan anak  2. Adanya Tempat Penitipan Anak	1. Meningkatkan kapasitas Ormas dan LSM agar dapat berperan menjadi lembaga konsultasi						1. Dinsosp3apmd 2. Disdikpora 3. Dinkesppkb 4. LSM 5. Ormas
19.	Tersedia lembaga kesejahteraan sosial									
D	INDIKATOR CLUSTER III : HAK KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN									

No	Indikator KLA	Masalah	Kegiatan	Indikator	Waktu / Tahun 2022 – 2026					Penanggung jawab
20.	Angka Kematian Bayi (AKB)		1. Peningkatan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan melahirkan 2. Kampanye persalinan di tolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan 3. Peningkatan dan pembinaan kelurahan Siaga dan Kelurahan Layak Anak	1. Semua ibu yang melahirkan mendapat pertolongan dari nakes dan di fasilitasi kesehatan 2. Terwujudnya Desa/ Kelurahan siaga dan						1. Dinkesppkb 2. Puskesmas
21.	Prevalensi kekurangan gizi <del>pada balita</del>		Sosialisasi peningkatan gizi masyarakat terutama <del>anak-anak</del>							Dinkesppkb
22.	Persentase ASI <del>ekklusif</del>									
23.	Jumlah Pojok ASI									
24.	Persentase imunisasi dasar lengkap		Sosialisasi pencegahan dan penanggulangan penyakit menular kepada masvarakat dan anak-							1. Dinkesppkb 2. Puskesmas



No	Indikator KLA	Masalah	Kegiatan	Indikator	Waktu / Tahun 2022 – 2026					Penanggung jawab
25.	Puskesmas Ramah Anak	Menyediakan Pojok ASI dan tempat Bermain Ramah	Penambahan 3 Kecamatan							1. Dinkesppkb 2. Puskesmas
26.	Jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan		1. Penyuluhan PIK Remaja 2. Penyuluhan tentang							1. Dinkesppkb 2. Puskesmas
27.	Jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan		1. Memberikan pelayanan kesehatan secara gratis kepada masyarakat terutama anak-anak 2. Pelayanan kesehatan							1. Dinkesppkb 2. Puskesmas
28.	Persentase rumah tangga dengan akses air bersih		1. Sosialisasi pola hidup sehat kepada masyarakat dan anak-anak 2. Penataan sanitasi							Dispuprprkp
29.	Tersedia kawasan									
E INDIKATOR CLUSTER IV : HAK ATAS PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN SENI BUDAYA										
30.	Angka partisipasi pendidikan anak usia dini	Masih ada anak yang belum terlayani dengan PAUD	Peningkatan kuantitas PAUD di Kabupaten Kenulauan Anambas	Perluasan dan pemerataan PAUD disemua						Disdikpora



No	Indikator KLA	Masalah	Kegiatan	Indikator	Waktu / Tahun 2022 – 2026					Penanggung Jawab
31.	Persentase wajib belajar pendidikan 12 tahun	Belum adanya data tentang kegiatan wajib belajar 12 tahun	Perlu dilakukan pendataan tentang kegiatan wajib belajar 12 tahun	Tersedianya data tentang kegiatan wajib belajar 12 tahun						Disdikpora
32.	Persentase sekolah ramah anak	1. Mempercepat deklarasi Sekolah Ramah Anak 2. Membuat Plank Sekolah Ramah Anak 3. Masih kurangnya sarana dan prasara pada SD, SMP dan SMA seperti MCK, mobiler, buku bacaan dan ruang pustaka 4. Masih banyaknya pedagang asongan yang berjualan disekitar sekolah SD, SMP dan SMA sehingga anak-anak banyak mengkonsumsi makanan yang kurang terjamin kesehatannya	1. Peningkatan dan Penambahan sarana dan prasarana 12 sekolah 2. Perlunya meningkatkan pengawasan dan bimbingan tentang makanan sehat 3. Perlunya penambahan bak sampah (organik dan non organik) dan bimbingan orang tua dan guru untuk mendidik anak membuang sampah pada tempatnya	1. Terpenuhinya sarana, prasarana dan mutu pendidikan yang berkualitas 2. Terciptanya animo dan kesadaran pedagang untuk menjual makanan yang sehat 3. Tersedianya bak sampah organik dan non organik						1. Disdikpora 2. Dishub LH 3. Satpolpp dan Damkar 4. Kepala Sekolah

No	Indikator KLA	Masalah	Kegiatan	Indikator	Waktu / Tahun 2022 – 2026					Penanggung Jawab
		5. Masih kurangnya sarana tempat sampah dan kesadaran anak didik untuk membuang sampah sesuai dengan jenis sampah		disetiap sekolah sehingga sampah bisa langsung terpilah dari sumber sampah						
33.	Jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana	Masih minimnya sekolah yang memiliki sarana antar jemput siswa	Pengadaan armada transportasi antar jemput siswa (bus sekolah)	Tersedianya transportasi masal untuk antar jemput						Dishub LH
34.	Tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak	1. Masih rendahnya akses untuk mengikuti kegiatan seni budaya oleh anak-anak dari keluarga kurang mampu 2. Terbatasnya sarana ruang terbuka (taman) untuk bermain anak	1. Perlunya pembinaan terhadap sanggar seni yang memberikan akses pelayanan kegiatan sanggar 2. Pemanfaatan taman yang ada sebagai tempat bermain bagi	1. Peningkatan kuantitas sanggar seni bagi anak-anak dari kurang mampu 2. Tersedianya						1. Disparbud 2. Disdikpora 3. Dispuprprkp

No	Indikator KLA	Masalah	Kegiatan	Indikator	Waktu / Tahun 2022 – 2026					Penanggung jawab
35.	Rute Aman dan Selamat ke dan Dari Sekolah (RASS)	1. Tersedianya Fasilitas Pejalan Kaki di sekitar Sekolah 2. Zebra Cross 3. Masih kurangnya Zona Aman Sekolah 4. SK Penempatan Petugas Dishub di Sekolah Ramah Anak	1. Penambahan Ruang Tunggu Anak 2. Penambahan Zebra Cross di 24 Sekolah 3. Penambahan Zona Aman 22 Sekolah 4. Penempatan Polisi Anak dengan dilatih Disub dan Polres 5. Pembuatan SK	1. Tersedianya ruang tunggu anak-anak sekolah 2. Tersedianya fasilitas zebra cross disekolah 3. Terpenuhinya zona aman sekolah						1. Disdtkpora 2. Dishub LH

D

INDIKATOR KLAS TER V : PERLINDUNGAN KHUSUS



No	Indikator KLA	Masalah	Kegiatan	Indikator	Waktu / Tahun 2022 – 2026					Penanggung jawab
36.	Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memperoleh pelayanan	Data tentang persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus belum lengkap	1. Melakukan pendataan tentang persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus belum lengkap 2. Pelatihan tenaga pengajar bagi anak berkebutuhan khusus 3. Pelatihan pendidikan non formal 4. Sosialisasi UU perlindungan anak, KDRT dan kebijakan anti trafficking kepada Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan serta kelompok masyarakat	1. Tersedianya data anak yang memerlukan perlindungan khusus yang valid dan lengkap 2. Tersedianya tenaga pengajar bagi anak berkebutuhan khusus 3. Anak yang putus sekolah memperoleh pendidikan non formal 4. Tersosialisasi nya UU perlindungan anak, KDRT dan kebijakan anti trafficking kepada Kepolisian, Kejaksaan						1. Dinsosp3apmd 2. Disdikpora 3. Kepolisian 4. Bagian Hukum Setda

No	Indikator KLA	Masalah	Kegiatan	Indikator	Waktu / Tahun 2022 – 2026					Penanggung jawab
37.	Persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif ( <i>restorative justice/ RJ</i> ) dan <i>diversi</i>	<div>1. Anak yang berhadapan dengan hukum sering mengulang perbuatan yang sama</div> <div>2. Anak berhadapan dengan hukum belum bisa diterima baik dimasyarakat</div> <div>3. Adanya ABH yang melakukan perbuatan tersebut karena dieksploitasi oleh orangtua</div>	<div>1. Penyuluhan hukum bagi kelompok masyarakat dan kelompok anak serta memberikan keterampilan sesuai dengan kebutuhan dan minat anak</div> <div>2. Penyuluhan hukum tentang eksploitasi anak bagi kelompok masyarakat</div>	<div>1. Berkurangnya kasus-kasus ABH</div> <div>2. Berkurangnya kasus-kasus eksploitasi anak oleh keluarga</div>						<div>1. Satpolpp dan Damkar</div> <div>2. Polres</div> <div>3. Bagian Hukum Setda</div>

No	Indikator KLA	Masalah	Kegiatan	Indikator	Waktu / Tahun 2022 – 2026					Penanggung jawab
38.	Adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak	1. Mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak	1. Trauma healing bagi anak-anak korban bencana termasuk anak berkebutuhan khusus	1. Tersedianya fasilitas bagi anak-anak korban bencana						1. Dinsosp3apmd
		2. Adanya prediksi-prediksi terjadinya bencana membuat kepanikan ditengah-tengah masyarakat 3. Mekanisme penaggulangan bencana untuk anak yang berkebutuhan khusus belum terakomodir	2. Perluasan cakupan simulasi penanganan bencana di masyarakat secara berkelanjutan (sekolah, masyarakat dan kantor) 3. Penambahan zona evakuasi	termasuk anak berkebutuhan khusus 2. Anak siaga bencana 3. Meningkatnya jumlah zona evakuasi						2. Bpbd 3. Satpolpp dan Damkar



No	Indikator KLA	Masalah	Kegiatan	Indikator	Waktu / Tahun 2022 – 2026					Penanggung Jawab
39.	Persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak (BPTA)	Anak yang melakukan pekerjaan terburuk bagi anak seperti menjadi pengemis dan anak jalanan yang dieksploitasi oleh orang lain	1. Pemberdayaan ekonomi keluarga 2. Pola asuh bagi keluarga 3. Sosialisasi tentang kesehatan reproduksi remaja 4. Advokasi dan sosialisasi ke dunia usaha dan masyarakat untuk tidak mempekerjakan anak	1. Meningkatnya kesejahteraan keluarga 2. Menurunnya angka perkawinan dini 3. Tidak ada anak yang terlibat dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak						1. Dinsosp3apmd 2. Dinkesppkb 3. Disnaker

2. Isu Strategis lainnya :

NO	ISU STRATEGIS	JENIS KEGIATAN	OUTPUT	KERANGKA WAKTU					PELAKSANA OPD/ LEMBAGA	SASARAN/ TARGET GROUP	KET.
				20 22	20 23	20 24	20 25	202 6			
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Belum semua Desa memiliki profil anak ditingkat Desa	Penyusunan draf kabupaten tentang profil anak	Jumlah Desa yang memiliki profil anak dan profil Desa	V	V	V	V	V	DINSOSP3-APMD	Pemerintah Desa	
2	belum semua anak memiliki akta kelahiran	optimalisasi peran Pemerintah Desa dalam memberikan pemahaan kepada masyarakat akan pentingnya akta dan kemilikan akta kelahiran	Jumlah anak-anak Desa yang memiliki akta	V	V	V	V	V	Dinas Kependudu-kan dan Pencatatan Sipil	Masyarakat	Pandangan masyarakat dalam mengurus akta kelahiran
3	belum semua	sosialsiasi kepada	Jumlah anak yang	V	V	V	V	V	Dinas	anak usia	

	masyarakat paham manfaat Kartu Identitas Anak (KIA)	masyarakat	punya KIA						Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0-17 tahun	
4	belum semua Desa dan kecamatan melibatkan forum anak dalam musrenbang	mendorong Pemerintah Daerah membuat surat edaran keterlibatan anak di dalam musrenbang	Jumlah kelompok/lembaga anak yang terlibat dalam musrenbang dan hak partisipasi terpenuhi	V	V	V	V	V	Bappeda	Kelompok /lembaga anak di Desa	
5	belum ada data valid tentang sanggar anak	pendataan sanggar anak	Jumlah sanggar anak	V	V	V	V	V	Dinas Kebudayaan	Keluarga atau sanggar masyarakat	
6	minimalnya pendataan fasilitas ditingkat Desa terkait minat anak	meningkatkan minat anak dan peningkatan fasilitas	Jumlah fasilitas layak anak di Desa	V	V	V	V	V	DINSOSP3A-PMD	semua Desa di Kabupaten Kepulauan Anambas	
7	belum semua Desa memiliki sekretariat forum anak Desa	inisiasi pembentukan dan fasilitasi sekretariat forum anak Desa	Jumlah Desa yang memiliki sekretariat forum	V	V	V	V	V	Bappeda/ DINSOSP3-APMD	semua Desa di Kabupaten	



			anak							Kepulauan Anambas	
8	belum semua Desa memiliki program kegiatan untuk forum anak	peningkatan kapasitas dan kualitas forum anak Desa	Jumlah Desa yang memiliki forum anak	V	V	V	V	V	Bappeda/ DINSOSP3- APMD	Forum anak	
9	Peningkatan Kompetensi SDM	Pendidikan dan Pelatihan PNS	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Struktural, Diklat Fungsional dan Diklat Teknis	V	V	V	V	V	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	seluruh PNS Kabupaten Kepulauan Anambas	
10	Peningkatan Kompetensi SDM	Seleksi CPNS dan Seleksi IPDN	Jumlah CPNS dan Praja IPDN	V	V	V	V	V	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	seluruh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Anambas	
11	Pelayanan	Akta kelahiran	Jumlah anak yang memiliki akta kelahiran	V	V	V	V	V	Dinas Kependudukan dan	Seluruhan anak di kabupaten	

									Pencatatan Sipil	Kepulauan Anambas	
12	Pelayanan	Disabilitas dalam Forum Anak Kepulauan Anambas	Jumlah anak yang mendapat hak khusus	V	V	V	V	V	Forum Anak	seluruh anak di Kabupaten Kepulauan Anambas	
13	Forum Anak	memperjuangkan hak-hak anak di bidang pendidikan baik formal, non formal dan informal	Jumlah anak yang terpenuhi haknya	V	V	V	V	V	Forum Anak	seluruh anak di Kabupaten Kepulauan Anambas	
14	Forum Anak	memperkuat jaringan komunikasi antar forum anak dengan anak,dengan pemerintah maupun untuk menjalin komuni- kasi yang baik antar Forum Anak di daerah lain	Jumlah anak yang terpenuhi haknya	V	V	V	V	V	Forum Anak	seluruh anak di Kabupaten Kepulauan Anambas	

15	Forum Anak	memperjuangkan hak anak dalam memperoleh kesehatan baik kesehatan jasmani maupun rohani	Jumlah anak yang terpenuhi haknya	V	V	V	V	V	Forum Anak	seluruh anak di Kabupaten Kepulauan Anambas	
16	Forum Anak	memperjuangkan bahwa anak harus selalu terlindungi dan terjaga keamanannya	Jumlah anak yang terpenuhi haknya	V	V	V	V	V	Forum Anak	seluruh anak di Kabupaten Kepulauan Anambas	
17	Hak Kebebasan	Pembinaan dan pengembangan perpustakaan Desa dan komunitas, salah satunya program perpustakaan sebagai tempat kegiatan yang aman dan nyaman bagi anak-anak	Jumlah anak yang terpenuhi haknya	V	V	V	V	V	Forum Anak	seluruh anak di Kabupaten Kepulauan Anambas	
18	Anak yang hidup dijalanan	Operasi Anak Jalanan	Jumlah anak terlantar yang kembali ke keluarga	V	V	V	V	V	Satpol PP, DINSOSP3-APMD, Polres	Anak Jalanan, gelandangan, pengemis,	



										psikotik (orang dengan gangguan jiwa)	
19	Penyimpangan pengguna warnet	Razia Warnet	Menurunnya jumlah penyimpangan kenakalan remaja/peng- guna	V	V	V	V	V	Satpol PP	Pemilik warnet dan pengguna	

NO	ISU STRATEGIS	JENIS KEGIATAN	OUTPUT	KERANGKA WAKTU					PELAKSANA SKPD/ LEMBAGA	SASARAN/ TARGET GROUP	KETERA- NGAN
				202	202	202	202	202			
				2	3	4	5	6			
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Kekerasan terhadap anak	Sosialisasi PUPA kepada Kader PKK, RT,Dusun (PKDRT,	Jumlah peserta sosialisasi	V	V	V	V	V	DinsosP3- APMD, UPT PPT KKPA	Masyarakat Desa, terutama	

		<i>Trafficking, Parenting, dan Gender)</i>								Kader PKK, RT, Dusun	
2	Kekerasan terhadap anak	Pelatihan Penanganan Korban Kekerasan FPKKDS	Jumlah peserta pelatihan	V	V	V	V		DinsosP3-APMD, Kecamatan, Desa	Kader dan Sukarelawan di tingkat Desa	
3	Kekerasan terhadap anak	Pembentukan Forum Anak Desa	Jumlah Desa yang memiliki forum anak	V	V	V	V		DinsosP3-APMD	Kelompok/ Lembaga Anak di Desa	
4	Kekerasan terhadap anak	<i>Parenting</i>	Jumlah keluarga sasaran sosialisasi cara pengasuhan yang benar	V	V	V	V		DinsosP3-APMD	Seluruh Masyarakat	
5	Kekerasan terhadap anak	Memfungsikan BP4 yang ada di kecamatan	Jumlah keluarga sasaran sosialisasi	V	V	V	V		Kantor Kementerian Agama Kab. Kepulauan Anambas	Aparat Pemerintah Kecamatan	
6	Kekerasan terhadap anak	Inventarisasi Data Adopsi	Tersedianya Data adopsi	V	V	V	V		DINSOSP3-APMD	Petugas pendata DINSOSP3A	

										PMD	
7	Kekerasan terhadap anak	Mengoptimalkan dasa wisma untuk peduli anak	Jumlah dasa wisma sasaran sosialisasi	V	V	V	V		DINSOSP3-APMD	Kelompok perempuan di RT/ Dusun/ Desa	
8	Memperker - jakan Anak dibawah umur	membuka informasi untuk anak, koperasi dan kantin anak	Jumlah perusahaan swasta yang menaati regulasi	V	V	V	V		DINSOSP3-APMD, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Perusahaan Swasta	
9	Peningkatan Kompetensi SDM	Sosialisasi PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas PP No. 10 Tahun 1983 tentang Perkawinan dan Percerian Bagi PNS	Jumlah PNS peserta sosialisasi	V	V	V	V		Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas	
10	Peningkatan Kompetensi SDM	Program Peduli Keluhan Kawan (PELUK)	Jumlah PNS sasaran program	V	V	V	V		Badan Kepegawaian, Pendidikan	Seluruh PNS di lingkungan	



									dan Pelatihan	Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas	
11	Pelayanan	Akta Pengakuan Anak	Jumlah Anak yang diakui secara legal	V	V	V	V		Dinas Kependudu- kan dan Pencatatan Sipil	Seluruh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Anambas	
12	Pelayanan	Akta Pengesahan Anak	Jumlah anak adopsi yang disahkan	V	V	V	V		Dinas Kependudu- kan dan Pencatatan Sipil	Seluruh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Anambas	
13	Pelayanan	Akta Perkawinan	Jumlah perkawinan yang terdata secara resmi sehingga anak terlindungi haknya	V	V	V	V		Dinas Kependudu- kan dan Pencatatan Sipil	Seluruh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Anambas	

14	Pelayanan	Akta Perceraian	Jumlah perceraian yang terdata resmi sehingga orang tua tetap memenuhi hak Anaknya	V	V	V	V		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Seluruh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Anambas	
15	Pelayanan	Kartu Keluarga	Jumlah anak yang terdata sebagai bagian keluarga dan warga Negara	V	V	V	V		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Seluruh Anak di Kabupaten Kepulauan Anambas	
16	Pengembangan Inovatif	Bapak /Ibu Asuh Penanggulangan DBD	Jumlah peserta sosialisasi/ penyuluhan	V	V	V	V		Dinas Kesehatan	Seluruh masyarakat di Kab. Kepulauan Anambas	
17	Pengembangan Inovatif	Jumantik Mandiri Keluarga (JMK)	Jumlah peserta sosialisasi/ penyuluhan	V	V	V	V		Dinas Kesehatan	Seluruh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Anambas	

18	Pengembangan Inovatif	Kelas Kelompok Pendukung Ibu (KEKEP IBU)	Jumlah peserta sosialisasi/ penyuluhan	V	V	V	V		Dinas Kesehatan	Seluruh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Anambas	
19	Pengembangan Inovatif	SMS Bunda	Jumlah peserta sosialisasi/ penyuluhan	V	V	V	V		Dinas Kesehatan	Seluruh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Anambas	

NO	ISU STRATEGIS	JENIS KEGIATAN	OUTPUT	KERANGKA WAKTU					PELAKSANA OPD/ LEMBAGA	SASARAN/ TARGET GROUP	KETERA-NGAN
				2022	2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	12	13
1	Daya saing UKM	Pendidikan dan pelatihan perkoperasian	Jumlah peserta pelatihan teknis	V	V	V	V	V	Dinas KUKMP	Koperasi	



			dan fasilitasi permodalan								
2	Daya saing UKM	Sosialisasi prinsip -prinsip pemahaman Perkoperasian	Jumlah peserta sosialisasi	V	V	V	V	V	Dinas KUKMP	Pengurus dan anggota Koperasi	
3	Daya saing UKM	Revitalisasi dan pembangunan koperasi	Jumlah peserta sosialisasi/ pendampingan	V	V	V	V	V	Dinas KUKMP	Pengurus dan anggota Koperasi	
4	Daya saing UKM	Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi	Jumlah peserta sosialisasi/ pelatihan	V	V	V	V	V	Dinas KUKMP	Pengurus dan anggota Koperasi	
5	Daya saing UKM	Pendampingan bagi Dekopinda	Jumlah peserta sosialisasi/ pendampingan	V	V	V	V	V	Dinas KUKMP	Pengurus dan anggota Dekopinda Kab. Kepulauan Anambas	

6	Peningkatan Kompetensi SDM	Pengelolaan Administrasi dan Kesejahteraan	Jumlah anak PNS yang mendapat beasiswa dalam rangka memperingati HUT KORPRI	V	V	V	V	V	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Seluruh PNS di Kab.Kepulauan Anambas	
7	Peningkatan Kompetensi SDM	Peningkatan Aksesibilitas Petani terhadap Teknologi, Sumber-Sumber Pembiayaan, Serta Informasi Pasar dan akses pasar	Jumlah peserta sosialisasi/ pendampingan	V	V	V	V	V	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)	Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)	
8	Peningkatan Kompetensi SDM	Peningkatan Kedaulatan Pangan	Jumlah peserta sosialisasi/ pelatihan	V	V	V	V	V	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan (Diperpautkan)	Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)	
9	Penggunaan KIA dengan dan berbagai dunia	Peningkatan fungsi KIA	Jumlah perusahaan yang bekerja sama	V	V	V	V	V	Dinas Kependudukan	BUMN, BUMD dan Perusahaan	

	usaha		terkait KIA						Pencatatan Sipil	Swasta	
10	Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	Pengembangan Varietas Pertanian	Jumlah peserta sosialisasi/ pelatihan/ pendampingan	V	V	V	V	V	DLH, Diperpautkan	Kelompok Wanita Tani (KWT)	
11	Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	Pelatihan Teknis Pengolahan Hasil Perikanan	Jumlah peserta sosialisasi/ pelatihan/ pendampingan	V	V	V	V	V	DLH, Diperpautkan	Kelompok Wanita Nelayan	
12	Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	Pelatihan Operasional Pengolahan Pabrik Es	Jumlah peserta sosialisasi/ pelatihan/ pendampingan	V	V	V	V	V	DLH	Kelompok Wanita Nelayan	
13	Pemberdayan Ekonomi Perempuan	Pengembangan Perempuan Kepala Keluarga (PEKA)	Jumlah peserta sosialisasi/ pelatihan/ pendampingan	V	V	V	V	V	DINSOSP3-APMD	Perempuan Kepala Keluarga	
14	Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	Sekolah Pangan Iklim	Jumlah peserta sosialisasi/ pelatihan/ pendampingan	V	V	V	V	V	Diperpautkan, DLH	Perempuan Pedesaan	



15	Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	Pelatihan Tanam Jajar Legowo	Jumlah peserta sosialisasi/ pelatihan/ pendampingan	V	V	V	V	V	Diperpautkan, DLH	Kelompok Wanita Tani (KWT)	
16	Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	Program berkelanjutan Penerapan Teknologi Pendampingan Pertanian	Jumlah peserta sosialisasi/ pelatihan	V	V	V	V	V	Diperpautkan, DLH	Kelompok Wanita Tani (KWT)	
17	Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	Budidaya Pertanian dengan Tenaga Kerja Wanita	Jumlah peserta sosialisasi/ pelatihan	V	V	V	V	V	Diperpautkan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Perempuan Pedesaan	
18	Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	Pengolahan Minyak Goreng Bekas (BANG TIGOR)	Jumlah peserta sosialisasi/ pelatihan	V	V	V	V	V	DLH	Perempuan Pedesaan	
19	Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	Usaha Penyandang Disabilitas	Jumlah peserta sosialisasi/ pelatihan	V	V	V	V	V	Dinas Kesehatan/ DinsosP3A- PMD	Penyan- dang disabilitas perempuan	
20	Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	Forum Anak Peduli Lansia	Jumlah peserta sosialisasi/ pelatihan/ pendampingan	V	V	V	V	V	Dinas Kesehatan	Kelompok/ Lembaga Anak	

21	Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	Kawasan Bebas Rokok	Jumlah peserta sosialisasi/ pelatihan/ pendampingan	V	V	V	V	V	Dinas Kesehatan	Masyarakat	
22	Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	Pembuatan media promosi kesehatan	Jumlah peserta sosialisasi/ pelatihan/ pendampingan	V	V	V	V	V	Dinas Kesehatan	Masyarakat	
23	Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	Kantin sehat	Jumlah peserta sosialisasi/ pelatihan	V	V	V	V	V	Dinas Kesehatan	Sekolah dan Perusahaan	
24	Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	Perusahaan peduli ASI dan gizi	Jumlah peserta sosialisasi/ pelatihan	V	V	V	V	V	Dinas Kesehatan	BUMN, BUMD dan Perusahaan Swasta	
25	Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	Lomba pondok pesantren sehat	Jumlah peserta sosialisasi/ pelatihan/ pendampingan	V	V	V	V	V	Dinas Kesehatan	Santri	
26	Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	ProgramnSekolah Peduli Anemia	Jumlah peserta sosialisasi/ pelatihan/ pendampingan	V	V	V	V	V	Dinas Kesehatan	SD dan SMP	

27	Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	Santri siaga	Jumlah peserta sosialisasi/ pelatihan/ pendampingan	V	V	V	V	V	Dinas Kesehatan	Santri	
28	Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	Festival Anambas Sehat	Jumlah peserta sosialisasi/ pelatihan/pendam pingan	V	V	V	V	V	Dinas Kesehatan	Masyarakat	
29	Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	Dialog interaktif tentang kesehatan	Jumlah peserta sosialisasi/ pelatihan/ pendampingan	V	V	V	V	V	Dinas Kesehatan	Masyarakat	
30	Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	Puskesmas sehat jiwa	Jumlah peserta sosialisasi/ pelatihan	V	V	V	V	V	Dinas Kesehatan	Masyarakat	
31	Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	Pengembangan layanan dan konseling VCT	Jumlah peserta sosialisasi/ pelatihan/ pendampingan	V	V	V	V	V	Dinas Kesehatan	Masyarakat	
32	Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	Pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN),Kontrase ptif	Jumlah peserta sosialisasi/ pelatihan/	V	V	V	V	V	Dinas Kesehatan	Petugas Medis, Sukarelawan	



		Teknologi update (CTU), Alat Bantu Pengambilan Keputusan Ber-KB	pendampingan							n	
33	Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	Kemitraan Dokter Ahli Obsgyn dan Dokter Ahli Anak	Jumlah peserta sosialisasi/ pelatihan/ pendampingan	V	V	V	V	V	Dinas Kesehatan	Dokter dan Petugas Medis	
34	Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	Penyusunan Jejaring KIBBLA	Jumlah peserta sosialisasi/ pelatihan/ pendampingan	V	V	V	V	V	Dinas Kesehatan	Ibu melahirkan dan Anak	

NO	ISU STRATEGIS	JENIS KEGIATAN	OUTPUT	KERANGKA WAKTU					PELAKSANA OPD/ LEMBAGA	SASARAN / TARGET GROUP	KETERA- NGAN
				202 2	202 3	202 4	202 5	202 6			
1	2	3	4	6	8	9	10	11	12	13	14
1	Karakter anak	Pengembangan potensi seni budaya di lingkungan	Jumlah sekolah SMP yang memiliki	V	V	V	V	V	Kepala Sekolah dan	anak SMP	

		sekolah SMP	tim seni budaya						guru SMP		
2	Karakter anak	Sekolah Sehat	Jumlah UKS peserta sosialisasi/pelatihan/pendampingan pengelolaan sampah yang responsif gender	V	V	V	V	V	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora), Dinas Kesehatan	Sekolah, Guru , dan Siswa	
3	Karakter anak	Adiwiyata	Jumlah sekolah sasaran sosialisasi/pelatihan penanaman tanaman keras/toga	V	V	V	V	V	Disdikpora, DLH	Sekolah, Guru , dan Siswa	
4	Karakter anak	Sekolah Adiwiyata	Jumlah sekolah sasaran sosialisasi/pelatihan pendidikan karakter anak	V	V	V	V	V	Disdikpora, DLH	Sekolah SMA, SMP, dan SD	

			berwawasan lingkungan								
5	Karakter anak	Budaya Mutu	Jumlah sekolah sasaran sosialisasi/ pelatihan peningkatan prestasi anak	V	V	V	V	V	Disdikpora	Guru dan Siswa	
6	Karakter anak	Saka Kalpataru	Jumlah sekolah sasaran sosialisasi/ pelatihan pendidikan karakter anak berwawasan lingkungan	V	V	V	V	V	DLH	Siswa SMA dan anggota Pramuka	
7	Karakter anak	Pondok Pesantren berwawasan Lingkungan	Jumlah pondok pesantren sasaran sosialisasi/ pelatihan pendidikan karakter anak	V	V	V	V	V	DLH	Pondok Pesantren	



			berwawasan lingkungan								
8	Karakter anak	Lomba Kreasi Daur ulang sampah, Lomba Poster, dll	Jumlah sekolah sasaran sosialisasi/ pelatihan	V	V	V	V	V	DLH	Anak-anak setingkat SD, SMP dan SMA	
			pendidikan karakter anak berwawasan lingkungan								
9	Karakter anak	Sepekan (Sekolah Peduli Penyakit Anemia)	Jumlah sekolah sasaran sosialisasi	V	V	V	V	V	Dinas Kesehatan	Siswa SD, dan SMP	
10	Kekerasan terhadap anak	Sosialisasi UU perihal anak	Jumlah sekolah sasaran sosialisasi	V	V	V	V	V	Disdikpora, Dinsos P3A	Guru	
11	Karakter anak	Pengembangan potensi seni budaya di lingkungan sekolah SMP	Jumlah SMP yang memiliki TIM seni budaya di sekolah	V	V	V	V	V	Kepala Sekolah dan guru SMP	Anak SMP	
12	Karakter anak	Sekolah sehat	Jumlah sekolah yang memiliki UKS berwawasan	V	V	V	V	V	Disdikpora	Sekolah, Guru, dan Siswa	

			gender Pengelolaan sampah								
13	Karakter anak	Adiwiyata	Jumlah sekolah sasaran sosialisasi/ pelatihan	V	V	V	V	V	Disdikpora	Sekolah, Guru, dan Siswa	
14	Karakter anak	Budaya Mutu	Jumlah sekolah sasaran sosialisasi/ pelatihan	V	V	V	V	V	Disdikpora	Guru dan Siswa	
15	Kekerasan terhadap anak	Sosialisasi UU perihal anak	Jumlah sekolah sasaran sosialisasi	V	V	V	V	V	Disdikpora	Guru	
16	Peningkatan Kompetensi SDM	Pengelolaan Pendidikan	Jumlah PNS yang mengikuti Tugas Belajar dan Izin Belajar	V	V	V	V	V	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Seluruh PNS di Lingkungan Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas	kegiatan ini ada fasilitasi pemberian izin belajar bagi guru dan PNS lainnya
17	Peningkatann Kompetensi SDM	Sekolah Inklusi	Jumlah peserta didik penyandang	V	V	V	V	V	Disdikpora	Penyandang disabilitas	

			disabilitas yang bersekolah								
18	Peningkatan Kompetensi SDM	Studi Kajian Disabilitas	Jumlah rekomendasi kebijakan disabilitas	V	V	V	V	V	Dinsos P3A	Penyandang disabilitas	
19	Peningkatan Kompetensi SDM	Lomba menyimak cerita Tingkat SD, lomba alih aksara huruf jawa ke latin Tingkat SD, SMP, dan SMA, lomba bercerita dengan tema cerita rakyat Kepulauan Anambas	Jumlah anak yang mengikuti lomba	V	V	V	V	V	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Siswa SD, SMP, SMA	
20	Peningkatan Kompetensi SDM	Mengadakan pekan mewarnai bagi anak dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah anak yang mengikuti lomba mewarnai	V	V	V	V	V	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anak TK dan SD	
21	Inovatif	Pekan pemutaran film bagi 1000 anak TK dan SD di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah anak TK & SD yang mengikuti pemutaran film	V	V	V	V	V	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anak TK dan SD	



22	Inovatif	Menerima kunjungan kolektif dari sekolah TK hingga SMA dalam rangka pengenalan perpustakaan	Jumlah anak yang berkunjung ke perpustakaan	V	V	V	V	V	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anak TK dan SD, SMP, dan SMA	
23	Inovatif	Layanan mendongeng ( <i>story telling</i> ) melalui perpustakaan keliling bagi siswa TK dan SD	Jumlah anak yang mengikuti story-telling	V	V	V	V	V	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anak TK dan SD	

NO	ISU STRATEGIS	JENIS KEGIATAN	OUTPUT	KERANGKA WAKTU					PELAKSANA OPD/LEMBAGA	SASARAN /TARGET GROUP	KETERANGAN
				2022	2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14

1	Masih ditemukan Pekerja Anak di sektor Informal	Sosialisasi PPAPKH	Jumlah peserta sosialisasi	V	V	V	V	V	Instansi terkait, Disnakertrans, Dinas pendidikan, dan DinsosP3-APMD	Aparat desa/kecamatan, Dunia Usaha, Masyarakat, dan pekerja Anak	
2	Masih ditemukan Pekerja Anak di sektor Informal	Penarikan Pekerja Anak	Jumlah anak yang kembali bersekolah	V	V	V	V	V	Instansi terkait, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Disdikpora, dan Dinsos P3A	Aparat desa/kecamatan, Dunia Usaha, Masyarakat, dan pekerja Anak	
3	Pemberantasan Narkoba dan Psikotropika	Penyuluhan penyalahgunaan narkoba & psikotropika	Jumlah peserta penyuluhan	V	V	V	V	V	Polres, Dinas Kesehatan, DinsosP3A-PMD, dan Satuan Polisi	Aparat desa/kecamatan, Dunia Usaha,	

									Pamong Praja	Masyarakat , dan pekerja Anak	
4	Perlindungan Anak, Perempuan dan Kelompok Marginal	Peningkatan Kualitas SDM penanganan korban KDRT	Jumlah peserta sosialisasi/ pelatihan/ pendampingan penanganan KDRT	V	V	V	V	V	Polres, Dinas Kesehatan, DinsosP3- APMD, dan UPT PPT KKPA	Aparat desa/ kecamatan,  Dunia Usaha, Masyarakat , dan pekerja Anak	
5	Kebijakan Perlindungan Anak dan SOP Desa Layak Anak	Penadampingan korban KDRT	Jumlah peserta sosialisasi/ pelatihan/ pendampingan penanganan KDRT	V	V	V	V		KPPAD, Forum Anak, P2TP2A	Aparat desa/ kecamatan, Dunia Usaha, Masyara- kat, dan pekerja Anak	



6	Kebijakan Perlindungan Anak dan SOP Desa Layak Anak	Kerjasama CIQAL (Center for Improving Qualified Activity in Live of People with Disability	Jumlah peserta sosialisasi/ pelatihan/ pendampingan anak penyandang disabilitas		V	V	V		KPPAD, Forum Anak, P2TP2A	Aparat desa/ kecamatan, Dunia Usaha, Masyara- kat, dan pekerja Anak	

NO	ISU STRATEGIS	JENIS KEGIATAN	OUTPUT	KERANGKA WAKTU					PELAKSANA OPD/ LEMBAGA	SASARAN /TARGET GROUP	KETERA- NGAN
				202 2	202 3	202 4	202 5	202 6			
1	2	3	4	6	8	9	10	11 1	12	13	14
1	Peningkatan jumlah pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Pembangunan sarana olahraga	V	V	V	V	V	Disdikpora	Masyarakat dan atlet olahraga di Kabupaten	Lapangan tenis, sarana panjang

										Kepulauan Anambas	tebing, sirkuit sepatu roda, dan, lap volley
2	Peningkatan jumlah pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Pengadaan alat- alat olahraga	Jumlah alat- alat olahraga	V	V	V	V	V	Disdikpora	Atlet olahraga di Kabupaten Kepulauan Anambas	Senam, balap sepeda, judo, panahan, menembak, gateball, sepak takraw, dan dayung
3	Peningkatan jumlah pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga	Pemeliharaan rutin sarana olahraga	V	V	V	V	V	Disdikpora	Masyarakat dan atlet olahraga di Kabupaten Kepulauan Anambas	Stadion, lapangan pacuan kuda, lap tenis indoor, sirkuit, dan sepatu roda

4	Peningkatan jumlah pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Taman Edukatif Lalu Lintas	Jumlah anak yang mengunjungi taman	V	V	V	V	V	Dinas Perhubungan	Anak TK s.d. SMP	
5	Peningkatan jumlah pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Pelestarian Sumber Daya Air, dan Lingkungan Hidup	Jumlah peserta sosialisasi pelestarian SDA dan LH	V	V	V	V	V	DLH	Masyarakat	
6	Peningkatan jumlah pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Sekolah siaga bencana	Jumlah peserta sekolah siaga bencana	V	V	V	V	V	DINSOSP3AP MD	Taruna Siaga Bencana/ Sukarelawan	
7	Peningkatan jumlah pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Kunjungan sekolah di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah anak sekolah yang mengunjungi perpustakaan	V	V	V	V	V	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
8	Peningkatan jumlah pembangunan sarana dan	Pengadaan rutin koleksi berupa buku anak-anak setiap tahun	Jumlah buku bacaan untuk anak	V	V	V	V	V	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		



	prasarana olahraga										
9	Peningkatan jumlah pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Menyediakan ruangan khusus untuk koleksi buku anak-anak, terpisah dengan bacaan umum	Jumlah ruangan khusus penyimpanan buku anak	V	V	V	V	V	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
10	Peningkatan jumlah pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Layanan perpustakaan ke sekolah TK, SD, SMP, dan SMA serta TPA, PAUD dengan mobil perpustakaan keliling	Jumlah anak sekolah yang meminjam buku	V	V	V	V	V	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
11	Peningkatan jumlah pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Program pengembangan Ruang Terbuka Hijau/RTH (area baca <i>outdoor</i> ), yang dikombinasikan dengan taman bermain untuk anak dan tempat belajar atau akses internet berupa gazebo	Jumlah anak yang berkunjung ke RTH	V	V	V	V		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		

12	Peningkatan jumlah pembangunan sarana dan prasarana khusus merokok	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana khusus merokok	Pembangunan sarana khusus untuk merokok pada fasilitas umum	V	V	V	V		DLH, Dinas Kesehatan		
13	Penanganan sampah	Peningkatan jumlah Pengelola Sampah Mandiri (PSM) dan Bank Sampah tiap Desa	Pembentukan PSM dan Bank Sampah di tiap Desa	V	V	V	V		DLH	Masyarakat	Perlindungan anak dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh sampah
14	Penanganan sampah	Pengadaan sarana dan prasarana persampahan (gerobak sampah, tong sampah, motor pengangkut sampah)	Tertanganinya masalah persampahan	V	V	V	V		DLH	Masyarakat	Perlindungan anak dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh sampah

15	Konservasi Air	Pembuatan sumur resapan dan biopori	Mengurangi banjir dan menjaga ketersediaan air tanah	V	V	V	V		DLH	Area lahan untuk tangkapan air hujan	Menjamin ketersediaan air minum dan perlindungan banjir terhadap anak
16	Pengelolaan Limbah Ternak	Pembuatan IPAL Biogas	Terkelolanya limbah dari ternak untuk biogas	V	V	V	V		DLH	Kandang ternak	Perlindungan anak dari dampak negative limbah ternak
17	Inovatif	Desa Bebas 4 Masalah Kesehatan (DB4MK Plus)	Jumlah desa bebas 4 masalah kesehatan	V	V	V	V		Dinas Kesehatan	Pemerintah dan Masyarakat Desa	
18	Inovatif	Kawasan Bebas Asap Rokok	Jumlah tempat/titik yang bebas asap rokok	V	V	V	V		Dinas Kesehatan	Masyarakat	



19	Inovatif	Sedekah Sampah (Bank Sampah)	Jumlah bank sampah	V	V	V	V		Dinas Kesehatan	Masyarakat	
----	----------	---------------------------------	-----------------------	---	---	---	---	--	--------------------	------------	--

### BAB III

#### MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi merupakan alat ukur untuk menguji efektifitas implementasi RAD-KLA. Dimensi dampak RAD-KLA digunakan sebagai indikator evaluasi upaya capaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah dalam mewujudkan Daerah Layak Anak. Indikator lokal skala desa dan indikator KLA yang ditetapkan dalam perangkat monitoring dan evaluasi akan dijadikan tolok ukur untuk menguji pencapaian program.

Monitoring digunakan untuk mengetahui dan memberikan umpan balik proses pelaksanaan RAD-KLA. Monitoring ini dilaksanakan secara berkala dan terpadu oleh daerah melalui Badan Perencanaan Daerah minimal 12 bulan sekali.

Evaluasi merupakan alat untuk menilai hasil pelaksanaan RAD-KLA sebagai dasar perbaikan upaya peningkatan sinergitas masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha untuk mewujudkan daerah Layak Anak. Evaluasi ini dilaksanakan setiap tahun.

### BAB IV

#### PENUTUP

Pelaksanaan berbagai aksi Daerah diperlukan pemahaman yang sama dari para pemangku kepentingan terhadap model dan kebijakan pembangunan Daerah yang Layak Anak. Kebijakan KLA melalui pengembangan inisiatif di setiap Perangkat Daerah dimana hak-hak Anak menjadi pertimbangan utama dalam proses perencanaan pembangunan yang meliputi transformasi Konvensi Hak-Hak Anak dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan.

Terbangunnya pemahaman bersama terhadap kebijakan pengembangan Kabupaten Layak Anak dan meningkatnya kepedulian dari para pemangku kepentingan terhadap kebutuhan anak merupakan wujud dari upaya Pemerintah Daerah dalam pengembangan KLA. Hal ini diwujudkan dalam bentuk regulasi yang mengatur pembangunan Daerah dengan mengakomodasikan kebutuhan anak dan terciptanya koordinasi dalam perencanaan dan implementasi kebijakan berkaitan dengan KLA

antar Perangkat Daerah dan lembaga terkait.

Guna mewujudkan tujuan dimaksud diperlukan komitmen dan kepedulian dari Pemerintah Daerah dan seluruh komponen masyarakat dalam melaksanakan berbagai program KLA di Daerah.

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

dto

ABDUL HARIS